

Bab III

Agreement On Agriculture (AOA)

Negara-negara barat dahulunya juga merupakan negara-negara agraris, hidup dari hasil pertaniannya dan melindungi produksi pertaniannya. AS dan Uni-Eropa (dulu MEE- Masyarakat Ekonomi Eropa) terjadi persaingan yang tajam dalam perdagangan komoditas dan produk pertanian. Keduanya merupakan negara-negara maju dan negara industri akan tetapi ternyata mereka tidak menelantarkan sektor pertaniannya. Hal inilah yang mejadi kajian oleh para pemikir ekonomi pemerintahan saat itu, dimulainya revolusi industri dan awal-awal perkembangan kapitalisme abad ke-17.

A. Terbentuknya WTO (*World Trade Organization*)

”Kemenangan” Neoliberalisme atas lawannya Keynesianisme ini bukanlah tujuan akhir yang mereka kejar. Diluar pertarungan ideologis tersebut ada agenda politik lebih luas yang ingin dicapai sebagai tujuan pamungkas. Para intelektual Kanan Baru, seperti halnya intelektual lain mana saja, bukanlah sekelompok intelektual yang bebas dari berbagai kekuatan sosial. Mereka merupakan apa yang disebut oleh Gramsci sebagai ‘intelektual organik’; yaitu intelektual yang “secara organik” terkait dengan kekuatan-kekuatan sosial tertentu, yang pekerjaannya adalah mempertahankan maupun menyediakan legitimasi bagi kekuatan sosial berkuasa.

Para intelektual Kanan Baru berusaha demi memperkuat dan mempromosikan apa yang disebut sebagai “kekuatan struktural modal

internasional” : guna menjamin bahwa “perimbangan dialektis antara kekuatan-kekuatan “nasional” dan “transnasional “ menguntungkan yang disebut belakangan. Peran komprehensif negara dalam perekonomian dan buruh yang terorganisir secara kokoh semasa manajemen ekonomi Keynesian jelas menjadi hambatan serius bagi tercapainya agenda intelektual Kanan Baru untuk mendongkrak kekuatan struktural modal internasional. Dengan menyerang secara bersamaan manajemen ekonomi Keynesian dan *Welfare State*, sambil menempatkan kembali mekanisme pasar yang mengatur sendiri (*self-regulating market mechanism*), Kanan Baru berusaha mengurangi dan menghilangkan pengaruh kuat yang mungkin dimiliki buruh terorganisir dan negara dalam penguatan keputusan ekonomi.

Di bawah wacana kebijakan Kanan Baru, peran legitimate negara hanyalah untuk melindungi dan memfasilitasi operasi mekanisme pasar. Secara demikian, tidak saja mereka berusaha memadukan kepentingan negara dengan kepentingan modal internasional, tetapi juga membuat agar yang pertama mengabdikan pada kepentingan yang kedua melalui berbagai macam kebijakan yang diarahkan untuk membuka perekonomiannya bagi arus modal dan memfasilitasi operasinya yang menguntungkan. Devaluasi mata uang, deregulasi perdagangan dan investasi luar negeri, privatisasi maupun pelunakan regulasi dunia usaha semakin menjadi kebijakan lazim yang dimaksudkan untuk menjamin “iklim investasi” yang dianggap ramah modal internasional. Hasilnya adalah sebuah proses penyesuaian kebijakan-kebijakan nasional terhadap tuntutan dan persyaratan perekonomian dunia.

Kebijakan ekonomi yang diadopsi cenderung berorientasi keluar (*outward*) ketimbang ke dalam (*inward*) ketika negara menjadi bagian bangunan kompleks

ekonomi dunia dan menjadi semakin terkait dengan, jika bukan “mediator” atau rekanaan dari, internasionalisasi produksi dan modal. Sehingga peran negara dalam memproteksi perekonomian nasional dari dampak ekonomi eksternal tidak sebanyak perannya dalam menjembatani kedua wilayah itu. Menurut Mohtar Mas’oed,³⁸ sebagai kumpulan ide dan kebijakan, neoliberalisme pada intinya menganjurkan pemerintah menerapkan kebijakan dalam negeri sebagai berikut :

- a) Pasar harus diberi kebebasan untuk membuat keputusan sosial dan politik yang penting.
- b) Negara harus secara sukarela mengurangi peranannya dalam ekonomi.
- c) Perusahaan harus diberi kebebasan total.
- d) Serikat buruh harus diberangus.
- e) Proteksi sosial bagi warga negara harus dikurangi.

Untuk tingkat internasional, neoliberalisme mengutamakan tiga pendekatan pokok :

- a) Perdagangan bebas untuk barang dan jasa.
- b) Kebebasan sirkulasi kapital.
- c) Kebebasan investasi.

Era kebijakan yang bersandar pada ideologi neoliberalisme atau Kanan Baru dimulai oleh pendukung utamanya, yakni Presiden Amerika Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher. Kedua pejabat publik ini sama-sama sebagai pendukung pasar bebas, meskipun keduanya tidak selalu sepakat dalam mengambil bentuk-bentuk kebijakan publik. Thatcher lebih memakai moneterisme yang menekankan kontrol ketat atas *Money supply*, sedangkan pemerintahan Reagen didominasi oleh ekonom-ekonom yang menganut *supply*

³⁸ Mohtar Mas’oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hlm: 143

side, yang menyarankan pemotongan pajak guna memberikan insentif sebesar-besarnya bagi produksi.³⁹

Setelah era Reagan dan Thatcher kemenangan dan dominasi gagasan neoliberal dapat kita lihat dalam banyak manifestasi kebijakan dalam lembaga-lembaga internasional dan gagasan-gagasan tersebar dalam forum-forum ilmiah maupun media massa. Setelah mereka mendapatkan kemenangan dari persetujuan ideologisnya dengan pendukung Keynesian, kelompok ini kemudian memperjuangkan bagaimana mendorong liberalisasi dan perdagangan bebas dunia dengan menggunakan instrumen lembaga-lembaga keuangan internasional. Didukung oleh para pengambil kebijakan di lembaga-lembaga dunia (GATT/WTO, IMF, dan Bank Dunia) serta para pengambil kebijakan publik di negara-negara maju, pikiran-pikiran kelompok ini menjadi ideologi dominan dalam usahanya menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi di seluruh dunia. Mereka menekankan arti penting pasar bebas dan berusaha memarginalkan peran negara dalam proses-proses ekonomi.

Latar belakang berdirinya GATT dan kemudian berkembang menjadi WTO tidak terlepas dari sejarah timbulnya depresi ekonomi (*Great depression*) pada awal tahun 1930-an, reaksi yang timbul dari negara-negara maju ialah mengambil kebijakan perekonomian yang cenderung negatif / proteksionis dengan cara memberi hambatan-hambatan perdagangan, baik yang berbentuk tarif ataupun non-tarif. Hal itu berlanjut pada pasca perang dunia II, yang menyebabkan perdagangan internasional berada dalam keadaan yang tidak menentu. Untuk

³⁹ Budi Winarno. Globalisasi, Wujud Imperialisme Baru, Peran Negara dalam Pembangunan, Yogyakarta Tajidu Press, 2004, hlm.:90

menuntaskan resesi ekonomi dunia akhirnya negara-negara sekutu sebagai pihak pemenang perang dunia II, sepakat untuk merekonstruksi total perekonomian dunia dengan menerapkan sistem hubungan yang lebih teratur dan lebih menjamin perdamaian dan kesejahteraan sosial. Dengan menanamkan landasan-landasan yang memungkinkan peningkatan kegiatan perdagangan internasional yang lebih terbuka, dengan sistem perdagangan bebas. Pada saat piagam ITO dirancang di Jenewa, pada saat yang sama dirancang pula *the General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yakni perjanjian mengenai penurunan tariff / bea masuk dan perdagangan di bidang barang dan jasa, menyadari bahwa piagam ITO tidak diratifikasi oleh negara-negara pelaku utama perekonomian dunia maka negara-negara tersebut akhirnya mengambil inisiatif untuk memberlakukan GATT melalui “*Protocol of Provisional Application*” (PPA) yang ditandatangani oleh 22 anggota asli GATT pada akhir tahun 1947.⁴⁰

Semula GATT diciptakan sebagai bagian dari upaya penataan kembali perekonomian dunia, yang memiliki misi untuk mengurangi hambatan yang ada dalam perdagangan, baik hambatan yang berupa bea masuk (*tariff barrier*), maupun hambatan lainnya (*non – tariff barrier*)⁴¹. Dalam perkembangannya, pada putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dimulai di Punta del Este pada tahun 1986 hingga berakhir di Marrakesh (Maroko) pada tahun 1994, ada keinginan untuk mengupayakan penyempurnaan GATT menjadi organisasi internasional, yang mempunyai wewenang lebih luas dan lebih komprehensif dalam hal

⁴⁰ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta, Rajawali Press, 2003, hal. 104

⁴¹ H. S. Kartdjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta, UI-Press, 1997, hal. 18

substansi perjanjian yaitu dengan memasukkan masalah-masalah baru dan GATT tidak lagi diberlakukan sebagai suatu perjanjian yang bersifat sementara (*Interim*).

Hasil yang disepakati pada perundingan *Uruguay Round*, salah satunya adalah mengamanatkan pembentukan organisasi baru sebagai penerus GATT yaitu *the World Trade Organization (WTO)*. Di bawah persetujuan WTO, peraturan-peraturan GATT masih diberlakukan sebagai peraturan pokok perdagangan internasional di bidang barang. Setelah WTO terbentuk pada awal tahun 1995 maka peran GATT sebagai organisasi internasional digantikan oleh WTO. Hasil peraturan perundingan Uruguay mencakup 15 bidang, dengan tambahan masalah-masalah baru (*New Issues*) salah satunya mencakup bidang pertanian yang diatur dalam WTO melalui *Agreement on Agriculture (AoA)*.

WTO sendiri merupakan hasil dari kesepakatan dari Putaran Uruguay (1986-1994) dan mulai berlaku 5 Januari 1995 yang diratifikasi oleh 133 negara termasuk Indonesia. Badan inilah yang dipakai oleh negara-negara penganut neo-liberal untuk mengatur sistem perekonomian dunia, dimana organisasi ini mempunyai wewenang atas berbagai pengaturan tingkat dunia terhadap negara anggotanya berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai. Dengan kontrak yang mengikat, apalagi bersifat “kontrak mati” maka tidak alasan bagi negara anggota untuk menentang berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani.

Dalam berbagai kebijakannya kadang WTO tidak bertindak demokratis, dalam hal ini misalnya hanya negara-negara majulah yang berhak menawarkan

sebuah kebijakan, sedangkan negara-negara lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Sebagai sebuah organisasi perdagangan dunia, WTO memang syarat akan kepentingan negara kapitalis internasional untuk melakukan ekspansi kapital. Selain itu didalam WTO ternyata hanyalah tempat berlindung perusahaan-perusahaan Trans Nasional (TNC) yang dengan memakai negara asalnya untuk memainkan kebijakan didalam WTO, sehingga karena begitu besarnya kekuatan perusahaan-perusahaan TNC ini mereka menguasai 2/3 perdagangan dunia pada berbagai bidang perdagangan dunia.

Fungsi atau tujuan WTO dapat dilihat dalam Article III WTO, yaitu: (1) mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk memujudkan sasaran perjanjian tersebut, (2) sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dicapai beserta lampiran-lampirannya, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam Perundingan Tingkat Menteri, (3) mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan, (4) mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan, dan (5) menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global berkerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Dalam perkembangannya memang AOA merupakan agreement yang khusus membicarakan bidang pertanian dalam WTO.

B. Dinamikan Perjanjian Pertanian dalam WTO melalui AoA

Perjanjian pertanian (Agreement On Agriculture - AOA) mulai berlaku semenjak Januari 1995. AOA adalah sebuah perjanjian baru di dalam WTO sebagai hasil dari Uruguay Round, yang merupakan bagian dari ekspansi WTO atas isu-isu di luar perdagangan tradisional. Dengan menempatkan perjanjian di dalam WTO, maka dengan sendirinya WTO kini mempunyai peran utama sebagai pengendali dan penentu sektor pertanian di negara-negara anggotanya.

Dengan AoA ini, maka WTO mewajibkan anggota-anggotanya untuk: (1) membuka pasar domestiknya bagi masuknya komoditas pertanian dari luar, dan sebaliknya (disebut sebagai *market access*); (2) mengurangi dukungan dan subsidi terhadap petani (disebut sebagai *domestic support*); dan (3) mengurangi dukungan dan subsidi bagi petani untuk mengekspor (disebut sebagai *export competition*). Ketiga soal inilah yang diurus oleh AoA.⁴²

Perjanjian pertanian dalam forum WTO selalu menjadi perdebatan dan tidak pernah menemukan solusi permanen. Ini dibuktikan dengan selalu gagal atau dead lock yang terjadi diantara negara-negara anggota khususnya negara maju dan negara berkembang. Sektor pertanian memang menjadi salah satu sektor yang sangat vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan suatu negara. Pemerintah dari berbagai negara maju maupun berkembang akan selalu mengutamakan kebutuhan pangan masyarakatnya, oleh karena itu kebijakan yang berpihak terhadap para petani sebagai produsen pangan menjadi paling penting. Subsidi

⁴² WWF, "Agriculture In The Uruguay Round: Implications For Sustainable Development In Developing Countries", didalam Third World resurgence No. 100/101 dec. 98/jan.99, The WTO, Agriculture and Food Security, hlm. 34-35

menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi produksi pangan maupun kebutuhan masyarakat.

Sampai saat ini tahun 2013 perundingan pertanian dalam KTM WTO sudah terhitung 9 putaran, dimana pada setiap putarannya selalu terjadi perdebatan yang alot dalam perumusan kebijakan internasional. Perdebatan ini tidak dapat dihindari karena masing-masing negara anggota memiliki kepentingan masing-masing. Perjanjian WTO di Doha 2001, perjanjian WTO di Cancun 2003, perjanjian WTO di Hongkong 2005, perjanjian WTO di Genewa 2009, sampai perjanjian WTO di Indonesia 2013 menjadi bukti sejarah dari dinamika perdebatan diantara negara-negara anggota.

B.1 Perjanjian WTO di Doha, Qatar 2001

KTM IV WTO dilaksanakan di Doha, Qatar pada 9-14 November 2001 yang dihadiri oleh 142 negara. KTM tersebut menghasilkan dokumen utama berupa *Doha Ministerial Declaration* (Deklarasi Menteri/Deklarasi Doha) yang membahas mengenai diluncurkannya perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, HAKI, penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.

Deklarasi Doha memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. Perundingan dilaksanakan di Komite Perundingan Perdagangan (*Trade Negotiation Committee/TNC*) dan badan-badan

di bawahnya (*subsidiaries body*). Selebihnya, dilakukan melalui program kerja yang dilaksanakan oleh *Councils* dan *Committees* yang ada di WTO.⁴³

Adapun alinea 13 dari Deklarasi KTM Doha mengenai sektor pertanian menegaskan⁴⁴ :

“The Agreement to establish a fair and market-oriented trading system through a programme of fundamental reform encompassing strengthened rules and specific commitments on support and protection in order to correct and prevent restrictions and distortions in world agricultural markets. We reconfirm our commitment to this programme. The outcome of the negotiations we commit ourselves to comprehensive negotiations aimed at: substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies; and substantial reductions in trade-distorting domestic support.”

“(Perjanjian untuk membangun sistem perdagangan yang adil dan berorientasi pasar melalui program reformasi mendasar meliputi aturan diperkuat dan komitmen khusus pada dukungan dan perlindungan dalam rangka untuk memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk program ini. Hasil negosiasi kami berkomitmen untuk negosiasi komprehensif yang bertujuan untuk: perbaikan substansial dalam akses pasar; pengurangan, dengan maksud untuk penghapusan secara bertahap, semua bentuk subsidi ekspor; dan pengurangan substansial dalam dukungan domestik yang mendistorsi perdagangan).”

Hasil progresif yang dihasilkan dari KTM IV Doha khususnya untuk bidang pertanian adalah kesepakatan untuk mengadakan perundingan secara komprehensif membahas hal-hal yang berkenaan dengan: (1) peningkatan akses pasar dan penurunan semua bentuk subsidi pertanian ke arah penghapusan secara bertahap (*phasing out*); (2) pengurangan dukungan/subsidi domestik yang

⁴³ Mochamad Slamet Hidayat & Asianto Sinambela, et. al., *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Keempat, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2006, hal. 70.

⁴⁴ World Trade Organization, *Ministerial Declaration*, Ministerial Conference Fourth Session, Doha 9-14 November 2001, WT/MIN(01)/Dec/1, 20 November 2001, hal. 3.

mendistorsi perdagangan; dan (3) pemberian perlakuan khusus dan berbeda (SDT) bagi negara berkembang merupakan bagian integral dari perundingan dan harus dimuat dalam komitmen dan aturan-aturan WTO sehingga dapat efektif dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek pembangunan wilayah.

Indonesia menyetujui rumusan yang tercantum dalam Deklarasi Doha dalam pembahasan bidang pertanian hal tersebut disebabkan adanya beberapa elemen yang menjadi kepentingan Indonesia yaitu penerapan *Special and Different Treatment* (SDT) yang meliputi ketahanan pangan (*food security*), pembangunan pedesaan (*rural development*) dan jaminan penghidupan (*livelihood security*).⁴⁵ Persetujuan Bidang Pertanian telah terjadi banyak ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban antara negara maju dan negara berkembang. Sesuai dengan alinea 44 Deklarasi Doha disepakati bahwa pemberian SDT negara-negara berkembang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan-persetujuan WTO.⁴⁶ Oleh sebab itu, semua ketentuan yang mengatur masalah SDT akan ditinjau untuk dijadikan lebih operasional sesuai dengan kepentingan negara-negara berkembang.

SDT dalam subsidi domestik diperlukan untuk menciptakan keadilan. Dengan kata lain, negara berkembang perlu memiliki fleksibilitas dalam menggunakan subsidi tersebut. Karena itu, diperlukan pembedaan formula bantuan yang mendistorsi perdagangan atau *Agregate Measurement of Support*

⁴⁵ “KTM WTO ke-9: Terobosan untuk Selesaikan DDA”, dalam http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=1386&detail=true diakses tanggal 20 September 2015

⁴⁶ Erna Maria Lokollo, “Dari Konferensi Cancun ke Pertemuan *stocktaking* WTO: Perjuangan Panjang Negosiasi Pertanian Negara Berkembang”, dalam <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ART8-2b.pdf> diakses tanggal 20 September 2015

(AMS) serta dipertahankannya ketentuan *de minimis* bagi negara-negara berkembang. Negara berkembang perlu dikecualikan dalam hal pemberian subsidi untuk investasi dan *input* serta subsidi domestik untuk mendorong diversifikasi tanaman.⁴⁷

B.2 Perjanjian WTO di Cancun, Mexico 2003

KTM V WTO diselenggarakan di Cancún, Meksiko pada 10-14 September 2003. Konferensi tersebut yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Meksiko, H.E. Ernesto Derbez, dihadiri oleh 146 negara anggota, beberapa negara peninjau (*observer*), serta organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, OECD dan FAO. Sesuai dengan mandat dalam Deklarasi Doha, konferensi tersebut untuk mengadakan peninjauan terhadap implementasi dari kesepakatan kesepakatan yang telah dicapai pada KTM IV di Doha, termasuk pembuatan kerangka perundingan yang lebih riil. Berbeda dengan KTM IV di Doha pada tahun 2001, KTM V di Cancun tidak mengeluarkan deklarasi yang rinci dan substantif. Hal tersebut disebabkan karena para anggota gagal menyepakati secara konsensus, terutama terhadap draft teks pertanian, akses pasar produk non-pertanian dan *Singapore Issues*. Oleh karena itu, konferensi tersebut hanya mengeluarkan *Ministerial Statement* yang intinya antara lain:⁴⁸

⁴⁷ Witoro, "Memperdagangkan Kehidupan: Menelisik Nasib Beras di Bawah Pasal-Pasal WTO," dalam Sugeng Bahagijo (Ed.), *Globalisasi Menghempas Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 234.

⁴⁸ World Trade Organization, *Ministerial Statement: Adopted on 14 September 2003*, Ministerial Conference Fifth Session, Cancún, 10 - 14 September 2003, WT/MIN(03)/20, dalam https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt...e/annex3_e.doc diakses tanggal 04 desember 2016

1. Meminta *General Council* untuk berkerjasama dengan Dirjen WTO dalam melanjutkan perundingan di Jenewa dan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi paling lambat tanggal 15 Desember 2003 guna mengambil langkah yang diperlukan bagi tercapainya kesepakatan-kesepakatan terhadap isu-isu yang dirundingkan.
2. Menekankan bahwa untuk bidang-bidang di mana telah tercapai kesamaan pandangan para menteri akan mempertahankan konvergensi saat bekerja demi diterimanya hasil secara keseluruhan.
3. Ditekankan pula bahwa meskipun terjadi “*setback*”, para menteri menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan seluruh deklarasi dan keputusan Doha secara “*fully and faithfully.*”

B.3 Perjanjian WTO di Hongkong 2005

KTM VI WTO dilaksanakan pada 13-18 Desember 2005 di Hong Kong dalam rangka mencari kesepakatan Program Kerja Doha di bidang pertanian, akses pasar produk non-pertanian (*Non-Agriculture Market Access/NAMA*), jasa, aturan main perdagangan (*rules*), fasilitasi perdagangan, keterkaitan perdagangan dengan lingkungan, dan isu pembangunan. Bagi isu pertanian, KTM Hong Kong ditujukan untuk dapat sejauh mungkin melengkapi modalitas. Dalam KTM tersebut telah berhasil disepakati Program Kerja Doha yang dituangkan dalam *Ministerial Declaration*, yang berisi arahan dan *time line* bagi tiap isu yang dirundingkan.⁴⁹

⁴⁹ Rezlan Ishar Jenie & Asianto Sinambela, *Loc.cit.*

Keputusan mengenai *Ministerial Declaration* mengenai tiga pilar perundingan sektor pertanian adalah Dukungan Domestik: Disepakatinya jumlah *bound tariff* bagi pemotongan bantuan keseluruhan (*overall support*) dan bantuan yang mendistorsi perdagangan (AMS), serta negara berkembang tanpa komitmen AMS tidak harus mendapatkan pemotongan dalam *de minimis* dan bantuan keseluruhan (*overall support*). Subsidi Ekspor: Ditetapkannya batas akhir penurunan subsidi ekspor sampai dengan tahun 2013, disepakati pendisiplinan *State Trading Enterprises* (STEs), dan bantuan pangan (*food aid*). Akses Pasar: dimasukkannya konsep SP dan SSM dalam deklarasi sebagai bagian integral dari modalitas perundingan pertanian yang menyebutkan bahwa negara berkembang memiliki fleksibilitas untuk menentukan sendiri (*self designate*) banyaknya *tariff lines* bagi SP didasarkan pada kriteria *food security*, *livelihood security*, dan *rural development*. Negara berkembang juga berhak menggunakan mekanisme khusus dalam SSM berdasarkan kuantitas impor dan pemicu harga (*price trigger*). Penambahan unsur *price trigger* merupakan hasil perjuangan keras dari Kelompok G-33.⁵⁰

Deklarasi para Menteri menetapkan agar modalitas di bidang pertanian pertanian harus diselesaikan paling lambat pada 30 April 2006 dan draft jadwal yang komprehensif berdasarkan modalitas harus disampaikan paling lambat pada 31 Juli 2006. Selama perundingan tersebut berlangsung, sikap negara maju Uni Eropa melunak dan bersedia meniadakan dukungan domestik bagi sektor pertanian mereka pada tahun 2013 bukan pada tahun 2010 seperti dituntut

⁵⁰ Muhammad Nafan Aji, *Loc. Cit.*

Amerika Serikat dan negara-negara berkembang lainnya. Sikap ini ditanggapi negara berkembang secara positif.

B.4 Perjanjian WTO di Geneva, Swiss 2009

KTM VII WTO dilaksanakan tanggal 30 Nopember 2009 – 2 Desember 2009 di *Centre International Conférence Genève*, Jenewa. Konferensi tersebut dihadiri 153 anggota WTO dan 58 negara *observer* WTO. KTM tersebut kini kembali diadakan setelah WTO mengalami kebuntuan selama 4 tahun sejak KTM terakhir di Hong Kong tahun 2005. Ini juga sebagai tanda dibukanya kembali perundingan Putaran Doha yang juga mengalami kebuntuan selama 8 tahun, sejak pertama kali dikumandangkan di Doha, Qatar pada tahun 2001. Putaran Doha saat ini, sudah berlangsung 8 tahun, tetapi belum juga menyelesaikan hal-hal mendasar. Keinginan Dirjen WTO Pascal Lamy adalah untuk menyelesaikan modalitas pertanian dan modalitas NAMA secara minimum pada KTM ke-7 ini, dan setelahnya menyelesaikan semua agenda program Putaran Doha sampai dengan 2010, atau setidaknya sampai KTM berikutnya di tahun 2011.⁵¹

Sejak tanggal 29 November 2009 dan selama KTM berlangsung juga telah diadakan berbagai pertemuan tingkat Menteri untuk membahas isu Putaran Doha. Dua pertemuan pendahuluan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Indonesia yang sekaligus sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada KTM VII di Jenewa yaitu pertemuan dengan Kelompok G-20 dan pertemuan G-33 Ministerial Communiqué pada tanggal 29 November 2009 sebelum acara

⁵¹ Bonnie Setiawan, “Konferensi WTO ke-7,” Institute for Global Justice, dalam http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=1 diakses tanggal 27 Juni 2016

mengikuti acara resmi KTM VII WTO yang diselenggarakan tanggal 30 November – 2 Desember 2009. Adapun Pertemuan G-20 dipimpin oleh Brasil dengan topik utama yang dibicarakan adalah *State of Play* dari Perundingan Putaran Doha WTO.⁵² Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah komunike yang menekankan bahwa krisis ekonomi yang terjadi telah memberikan dampak yang serius pada perdagangan internasional yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya praktek ‘proteksionisme’ yang dilakukan oleh negara-negara maju dengan bentuk pemberian subsidi kepada petaninya.

Para menteri *Cairns Group* dalam komunike tersebut menekankan pentingnya sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar untuk merespon segala tantangan yang ada saat ini maupun yang akan datang, termasuk kebijakan proteksionisme dan krisis ekonomi. Kelompok ini juga menyerukan penyelesaian Perundingan Doha pada tahun 2010 untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral dan mengharapkan agar hasil-hasil Doha mencakup paket perbaikan di bidang perdagangan pertanian yang meliputi peningkatan peluang-peluang akses pasar, pengurangan subsidi di negara maju yang dapat mendistorsi perdagangan, dan menghapus subsidi ekspor.⁵³ Dihadapan para menteri *Cairn Group*, Indonesia menegaskan kembali agar perjuangan negara-negara berkembang di dalam G-33 yaitu SP dan SSM menjadi bagian yang harus diperjuangkan sebagai wujud dari SDT. Selanjutnya, delegasi Indonesia turut menghadiri pertemuan *Informal Group of Developing Countries* (IGDC) yang

⁵² Indah Suksmaningsih, “WTO Turn Around,” Institute for Global Justice, dalam http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=1 diakses tanggal 27 September 2016

⁵³ *Ibid.*

memiliki tema utama mempersatukan seluruh *negotiating groups* negara berkembang di WTO bersatu melambungkan kembali isu-isu pembangunan ke permukaan.⁵⁴

Pada pertemuan KTM VII ini menghasilkan deklarasi bersama yang “menggaris bawahi” pentingnya WTO sebagai alat utama sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan peraturan dan berkomitmen untuk melakukan aksi bersama agar WTO memainkan peran maksimal dalam mendorong pemulihan, pertumbuhan dan pembangunan negara berkembang, khususnya LDCs. Untuk itu negara berkembang dengan tegas menyatakan akan terus memperjuangkan dimensi pembangunan sesuai mandat Doha dan tidak akan mundur walaupun ada upaya untuk mengubah mandat Doha tersebut.⁵⁵ Dalam pidato pembukaannya. Ketua Sidang Mr. Andrés Velasco (Menteri Keuangan Chile) menjelaskan bahwa WTO telah mampu mencegah memburuknya krisis ekonomi saat ini dengan meminimalisir kebijakan proteksionis.⁵⁶ Ke depan kredibilitas WTO perlu terus diperkuat, antara lain melalui penyelesaian Putaran Doha yang berdimensi pembangunan. Kepatuhan anggota atas aturan WTO. Serta peningkatan pembangunan kapasitas.

Pascal Lamy dalam *Centre International Confèrence Genève*, Jenewa menyampaikan bahwa aturan WTO dan komitmen anggota dapat menjadi jaminan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ “KTM KE-7 WTO: Indonesia Serukan Diselesaikannya Putaran Doha Development Agenda pada Tahun 2010,” Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_category_id=1&news_sub_category_id=0&news_content_id=716&alldate=true diakses tanggal 27 September 2016

⁵⁶ Muhammad Nafan Aji, *Loc. Cit*

tidak diterapkannya kebijakan proteksionis.⁵⁷ Peran WTO sekarang adalah mendorong proses pemulihan ekonomi melalui antara lain fasilitas *trade finance*. Dalam pidatonya Pascal Lamy juga mengingatkan perlunya konferensi aturan WTO dengan kebijakan isu-isu prioritas lainnya, seperti isu perubahan lingkungan. Beberapa negara anggota juga menegaskan kembali agar diselesaikannya perundingan Doha pada akhir 2010.

Untuk menterjemahkan komitmen politis ke dalam upaya kongkrit di meja perundingan penyelesaian Putaran Doha, maka diperlukan kesungguhan dari seluruh anggota. Hal ini tidak dapat ditunda lagi, karena sangat penting untuk pertumbuhan dan peningkatan perekonomian anggota. Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu menyampaikan pernyataan bahwa WTO harus mampu merespon secara cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan ekonomi global kegagalan penyelesaian Putaran Doha yang telah dirundingkan delapan tahun adalah permasalahan fundamental yang dihadapi WTO saat ini. Untuk itu, hal utama yang perlu diperhatikan adalah: 1) penyelesaian Putaran Doha secara cepat dan tepat (*early and successful*) sesuai mandat pembangunan Doha; 2) terus berupaya menyelesaikan Putaran Doha pada tahun 2010; 3) menterjemahkan komitmen politik ke dalam aksi nyata; dan 4) mendayagunakan seluruh proses yang ada, termasuk pertemuan informasi, bilateral dan plurilateral.⁵⁸

Adanya indikasi bahwa pertemuan KTM VII WTO bukan untuk menyelesaikan Putaran Doha, tetapi untuk mengadopsi dua modalitas paling

⁵⁷ *Ibid*, hal. 112.

⁵⁸ Pidato dari menteri perdagangan RI, H.E. Mrs. Mari Elka Pangestu, Sidang Pleno KTM ke-7 WTO, Jenewa 30 November 2009. Dalam http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_category_id=1&news_sub_category_id=0&news_content_id=716&alldate=true diakses tanggal 11 September 2016

penting tersebut: Pertanian dan Industrial. Dengan demikian, hasil pertemuan tersebut secara resmi tidak merundingkan Putaran Doha. KTM kali ini memiliki peran strategis untuk memperkuat peran WTO dalam menjaga *rule-based multilateral trading system*.⁵⁹ Kevakuman yang telah lama berlangsung semenjak Hongkong mengakibatkan terjadinya tekanan pada anggota-anggota WTO untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ditambah dengan krisis ekonomi global, yang justru dipakai sebagai “dalih” WTO untuk mengurangi krisis melalui relaksasi ekonomi dan pembukaan pasar-pasar baru dan momentum arus perdagangan yang lebih terbuka pada pasar bebas.

B.5 Perjanjian WTO di Bali, Indonesia 2013

KTM WTO ke 9 diadakan pada tanggal 3 sampai dengan 7 Desember 2013 di Bali Indonesia. KTM ini merupakan kelanjutan perundingan Putaran Doha setelah terhenti pada putaran sebelumnya. Pertanian menjadi sorotan penting dalam KTM di Bali ini. India dan negara berkembang yang tergabung dalam G-33 Doha secara konsisten menyuarakan kepentingannya di sektor pertanian. India khususnya memainkan peran penting dan memandangi Paket Bali sebagai langkah positif dalam penyelesaian negosiasi Putaran Doha.

Paket Bali (*Bali Package*) telah memberikan sumbangsih yang besar dalam perjalanan WTO. Berikut tiga agenda penting dalam paket Bali, yaitu:⁶⁰

⁵⁹ Bonnie Setiawan, “Konferensi WTO ke-7,” Institute for Global Justice, dalam situs http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=1 diakses tanggal 11 September 2016

⁶⁰ “*Hasil Sidang Wto Ke 9 Di Bali & Peran Gaeki*”, Indonesia Coffee Exporters Association, dalam <http://gaeki.or.id/en/hasil-sidang-wto-ke-9-di-bali-peran-gaeki/> diakses tanggal 22 Juli 2016

1. Negara-negara berkembang dan kurang berkembang memperoleh manfaat yang besar dengan hasil negosiasi *trade facility* yang baru pertama kali dilakukan sepanjang perjalanan WTO
2. Paket Bali memberi keleluasan bagi negara-negara berkembang khususnya negara dengan populasi besar seperti Indonesia dan India untuk memberikan subsidi kepada petaninya dan menjamin ketersediaan pangan bagi kelompok miskin
3. Hasil kesepakatan Paket Bali juga mendorong untuk memberikan perhatian lebih bagi negara-negara kurang berkembang baik dalam hal akses pasar maupun bantuan lainnya.

Paket Bali memiliki 10 poin penting dalam pembahasan Konferensi Tingkat Menteri yaitu: fasilitas perdagangan, general services untuk pertanian, Public stockholding untuk ketahanan pangan, Tariff Rate Quota untuk produk pertanian, persaingan ekspor, perdagangan kapas, ketentuan asal barang, perlakuan khusus terhadap penyedia jasa dari negara kurang berkembang, Duty-Free and Quota-Free (DFQF) untuk negara kurang berkembang, dan mekanisme pengawasan Special and Differential Treatment terhadap negara kurang berkembang.⁶¹

Yang paling signifikan dalam sector pertanian adalah usulan dari Kelompok negara- negara berkembang (G-33). India yang termasuk didalamnya dan Indonesia sebagai ketua mengusulkan proposal *Public Stockholding for Food Security* yang memiliki tujuan hendak menghapuskan pembatasan pemberian

⁶¹ “Hasil KTM Bali Dinilai Bikin Rusak Ekonomi Nasional”, dalam http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/129140-%5B_Konten_%5D-Hasil-Hen0001.pdf diakses tanggal 30 november 2016

subsidi untuk kepentingan *Public Stockholding* dalam rangka membantu petani miskin dan meningkatkan bantuan pangan untuk kelompok masyarakat miskin. Secara teknis *Public Stockholding* yaitu peran pemerintah negara berkembang untuk membeli pangan dari petani sebagai persediaan/stok pangan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam rangka untuk mendukung petani miskin.

Tabel 1.2
Dinamika Perundingan WTO 2001-2013

Perjanjian KTM WTO	Isu/Pembahasan	Dinamika Forum	Hasil Perjanjian WTO
Putaran Doha, Qatar 2001	Perdagangan Jasa Produk Pertanian Tarif Industri Lingkungan HAKI Penyelesaian sengketa dan peraturan WTO	Muncul perbedaan kepentingan antara negara maju (AS dan negara-negara eropa) yang ingin mempertahankan pemberian subsidi yang berlebih kepada petaninya dan mengupayakan negara berkembang membuka pasarnya sedangkan negara berkembang (G-20 dan G-33) berusaha menghapus subsidi yang diberikan oleh negara maju dan produk pertanian tertentu dari negara berkembang dikecualikan dari liberalisasi.	Di bidang pertanian: peningkatan akses pasar dan penurunan semua bentuk subsidi pertanian ke arah penghapusan secara bertahap (<i>phasing out</i>) pengurangan dukungan/subsidi domestik yang mendistorsi perdagangan pemberian perlakuan khusus dan berbeda (<i>special Different on Treatment/SDT</i>)
Putaran Cancun, Mexico 2003	Evaluasi terhadap implementasi dari kesepakatan putaran Doha Pembuatan kerangka perundingan yang lebih riil terutama dalam teks pertanian, akses pasar produk non-pertanian dan <i>Singapore Issues</i>	Para anggota WTO gagal menyepakati secara konsensus dari draft pertanian, akses pasar produk non-pertanian serta <i>Singapore Issues</i> .	Konfrensi hanya mengeluarkan <i>Ministerial Statement</i>
Putaran Hongkong 2005	Mencari kesepakatan program kerja Doha di bidang pertanian, <i>Non-Agriculture Market Acces/NAMA</i> ,	Perdebatan antara Uni Eropa dengan Amerika dan negara-negara berkembang agar Eropa bersedia untuk menghapus dukungan domestik di sektor pertaniannya. Dengan tuntutan AS dan negara-negara berkembang maka Uni Eropa sepakat untuk	KTM ini telah berhasil menyepakati program kerja Doha yang dituangkan dalam <i>Ministerial Declaration</i>

	Jasa dan aturan main perdagangan, Fasilitas perdagangan, Isu pembangunan	meniadakan dukungan domestiknya pada tahun 2013 bukan pada tahun 2010.	mengenai 3 pilar sektor pertanian
Putaran Genewa, Swiss 2009	Menyelesaikan modalitas pertanian Menyelesaikan modalitas NAMA Membahas isu putaran Doha Isu pembangunan di Negara berkembang dan kurang berkembang	Sehari sebelum KTM VII WTO terjadi 2 pertemuan yaitu pertemuan G-20 dan G-33 yang membahas isu putaran Doha. Kelompok Cairns group juga melakukan pertemuan pada pagi hari sebelum pelaksanaan KTM VII WTO dimulai dengan menghasilkan kesepakatan untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang kuat serta paket perbaikan dibidang perdagangan pertanian. Sebagian besar delegasi dalam pertemuan WTO seperti Mr. Andres Velasco (menteri keuangan chile), Pascal Lamy dan Mari Elka Pangestu (menteri perdagangan RI) berpandangan untuk mendorong WTO sebagai alat yang harus diperjuangkan dan diperkuat untuk mengatasi problematika ekonomi dunia.	Hasil dari pertemuan ini lebih didorong untuk mengadopsi modalitas pertanian dan industrial, serta upaya untuk menjaga dan memperkuat <i>Rule-based multilateral Trading system</i> .
Putaran Bali, Indonesia 2013	Fasilitas perdagangan dan Ketahanan pangan di sektor pertanian	Dalam forum pelaksanaan KTM ke-9 WTO di Bali mengalami perdebatan yang alot yang dimotori oleh India sebagai Negara berkembang dengan Negara maju terkait pemberin subsidi pertanian. Kemudian diikuti oleh Negara amerika latin seperti Kuba, Venezuela, Bolivia, dan Ekuador yang menginginkan Amerika menghentikan embargo terhadap produk-produk amerika latin.	Hasil dari pertemuan KTM ke-9 WTO Bali disebut sebagai Paket Bali (<i>Bali Package</i>)

Sumber : diolah dari beberapa sumber bacaan dan situs internet

(<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135769-T%2028008>

[Diplomasi%20Indonesia-Analisis.pdf](#) dan

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/ART8-2b.pdf>